

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di atur pada peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan peran untuk melakukan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata. Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai bentuk perkembangan suatu daerah.

Banyaknya potensi pariwisata menjadikan pembangunan dan pengembangan sektor ini berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dan Negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 bahwa kontribusi sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam kebijakan pembangunan bagi Negara Indonesia yang memiliki berbagai aset kepariwisataan yang potensial untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi bangsa. Salah satu daerah dengan beragam potensi wisata di Indonesia yaitu Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Salah satunya yaitu pada Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan yang memiliki letak wilayah strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga sangat potensial untuk dilakukan pembangunan dan pengembangan sektor

kepariwisataan. Salah satu yang berperan dalam pengembangan pariwisata Desa Kelawi adalah masyarakat.

Sesuai dengan visi pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, yaitu “Menjadikan Sektor Pariwisata Sebagai Sektor Andalan Perekonomian Daerah, Berkelanjutan dan Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Arti Luas”, maka pembangunan kepariwisataan seharusnya melibatkan Partisipasi masyarakat selaku subjek ataupun pelaku dalam pembangunannya. Masyarakat sebagai tuan rumah memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah dan lembaga swasta.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*). Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) merupakan pola pengembangan pariwisata dimana seluruh aktivitas wisatawan berlangsung dan berbaur dengan masyarakat pedesaan. Pola pengembangan ini sejalan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yaitu memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata: serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan objek wisata pariwisata.

Dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan terdapat peran serta pemerintah dalam peningkatan kualitas ilmu pengetahuan serta kesadaran masyarakat didalam bidang pengelolaan objek wisata. yang dilakukan melalui pembentukan organisasi atau kelompok yang dapat menjadi salah satu komponen pembangunan kepariwisataan seperti

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelatihan, dan sosialisasi. Namun, terdapat pula berbagai hal lainnya yang dapat dilakukan sebagai strategi dan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan kondisi pada objek wisata terkait.

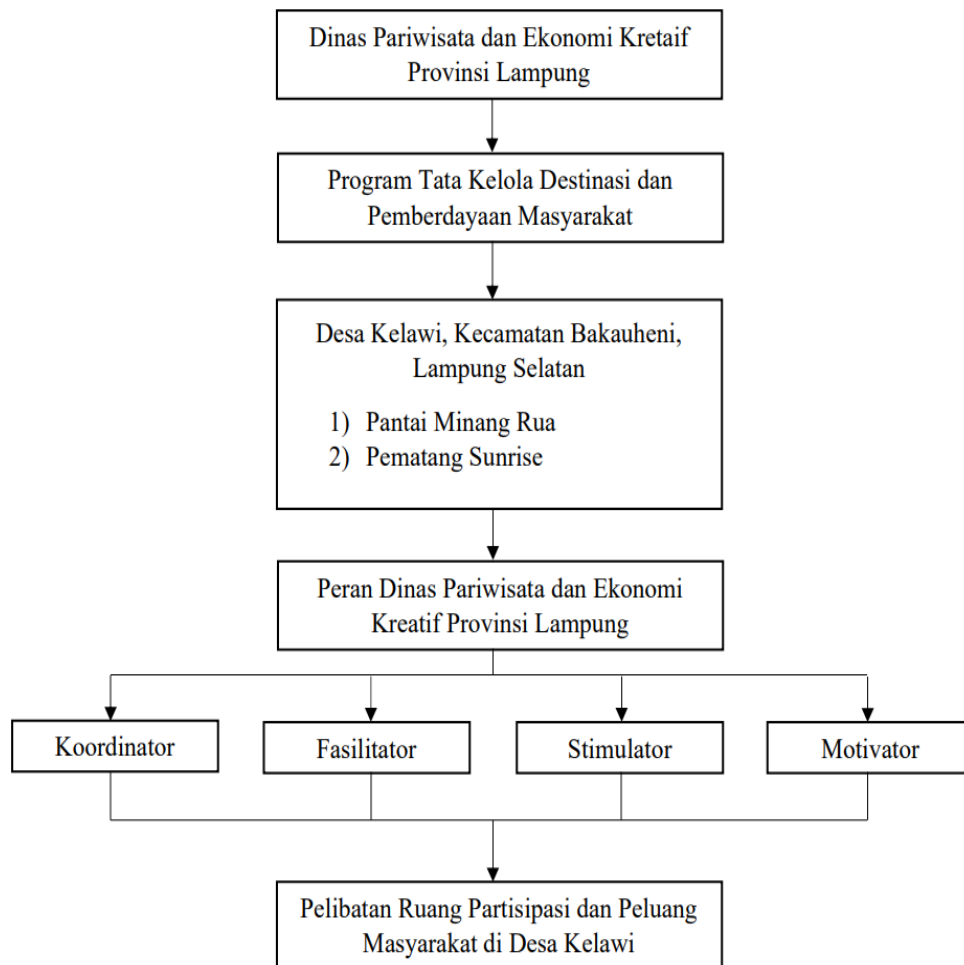
Oleh karena itu, tugas akhir ini dibuat agar dapat mengetahui masalah serta peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam menangani perkembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Desa Kelawi sehingga dapat menuju kondisi ideal dan mengatasi masalah yang ada sebagai koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator bagi wilayah terkait.

1.2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan
2. Mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan

1.3. Kerangka Pikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran peran Disparekraf Lampung terhadap pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat di Desa Kelawi

1.4. Kontribusi

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Politeknik Negeri Lampung

Sebagai sumber informasi dan referensi bacaan untuk kebutuhan akademisi, khususnya pada bidang kepariwisataan.

2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Sebagai bahan masukan terkait solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Desa Kelawi, Lampung Selatan

3. Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat dari segi akademisi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pariwisata

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 pengertian pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk berbagai tujuan sesuai kebutuhan seperti rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Pariwisata merupakan suatu sistem dengan berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya yang mana dibutuhkan hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). (Suwena dan Widyatmaja, 2007).

Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Pilar tersebut merujuk pada masyarakat umum yang ada pada objek wisata atau lokasi wisata asosiasi dan pengusaha pariwisata, serta pemerintah yang memiliki wewenang pada wilayah administrasi terkait (Pitana & Gayatri, 2005). Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata dapat secara efektif dilaksanakan apabila terdapat peran serta dari ketiga pilar tersebut.

2.2. Pola Pengembangan Pariwisata

Terkait dengan pengembangan pariwisata, Page (2009) menyebutkan setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan dalam pengembangan pariwisata yaitu:

- 1) *Boostern approach*

Pendekatan ini merupakan pendekatan sederhana yang menjelaskan bahwa pariwisata sebagai suatu akibat yang positif bagi suatu tempat berikut

penghuninya. Namun demikian, pendekatan ini tidak melihat adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.

2) *The economic industry approach*

Pendekatan pengembangan pariwisata lebih menekankan pada tujuan ekonomi daripada tujuan sosial dan lingkungan, serta *The economic industry approach*. Pendekatan pengembangan pariwisata lebih menekankan pada tujuan ekonomi daripada tujuan sosial dan lingkungan, serta menjadikan pengalaman dari pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung sebagai sasaran utama.

3) *The physical spatial approach*

Pendekatan pengembangan pariwisata ini mengacu pada penggunaan lahan geografis dengan strategi pengembangan berdasarkan prinsip keruangan (spasial). Misalnya pembagian kelompok pengunjung untuk menghindari konflik antar pengunjung.

4) *The community approach*

Pendekatan pengembangan pariwisata yang menekankan pada pelibatan masyarakat secara maksimal dalam proses pengembangan pariwisata.

5) *Sustainable approach*

Pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau kepentingan masa depan atas sumber daya serta dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan bagi perkembangan ekonomi, upaya-upaya pelestarian

lingkungan dan sumber daya alam, serta berdampak juga kepada kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan serta dapat berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati jika dilakukan dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) harus dilakukan dengan kriteria berkelanjutan sesuai dan mendukung sistem ekologis secara jangka panjang juga layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat

2.3. Peran Dinas Pariwisata

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikelola dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan pariwisata yang dikemukakan oleh Blakely (dalam Medy, R. 2018) antara lain koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator.

a) Peran sebagai koordinator

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan. Mencakup peran pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional.

Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.

b) Peran sebagai fasilitator

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas seperti sarana prasarana bagi objek wisata. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan seras dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

c) Peran sebagai stimulator

Dalam hal ini stimulator diartikan sebagai bentuk menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya tarik wisata dengan melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan baik kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan.

d) Peran sebagai motivator

Dalam pembangunan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak lepas dari dukungan masyarakat ataupun pengusaha di bidang pariwisata.

2.4. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Terdapat berbagai diskusi tentang salah satu pola pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, menurut Dunham (dalam Adi, 2017) menyebutkan bahwa *community development* lebih memfokuskan diri pada pengembangan kehidupan ekonomi, prasarana fisik, pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan dalam arti sempit. Dengan demikian, berdasarkan pandangan Dunham tersebut, maka sektor pariwisata termasuk dalam fokus kajian pengembangan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sektor pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem-subsistem lain, yang salah satunya adalah bidang ekonomi.

Beeton (2006) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya, adat, dan kearifan lokal sebuah tempat. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai harapan agar pembagian keuntungan dari usaha pariwisata lebih banyak diterima langsung oleh masyarakat. Masyarakat merupakan pemain inti dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, keterlibatan masyarakat dapat melalui panitia desa yang terpilih. Dalam pariwisata berbasis masyarakat, desa wisata merupakan salah satu daya tarik yang tidak dapat terlepas dari peran dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip *Community Based Tourism* (CBT) menurut UNEP dan WTO (2005) dalam Nurhidayati dan Fandreli (2012) sebagai berikut:

- 1) Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- 2) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek

- 3) Mengembangkan kebanggaan komunitas
- 4) Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan
- 6) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal
- 7) Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
- 8) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- 9) Mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas, dan
- 10) Berperan dalam menentukan presentasi pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada di komunitas